

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BAGI PEGAWAI DI BAGIAN KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN
PANGANDARAN**

Oleh
Lia Aprilia
liaaprilia982@yahoo.co.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jalan RE. Martadinata No 150 Ciamis

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan kualifikasi peserta, penyusunan laporan keuangan kurang rutin dilakukan dan pelaksanaan diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?; Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?; Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam mengikutsertakan pegawai kurang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai dan dalam penyampaian materi diklat kurang memotivasi peserta pelatihan, selain itu seringkali melakukan pemadatan materi sehingga waktu pelatihan terlalu singkat. Adanya hambatan-hambatan yang antara lain keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang antara lain menyiapkan anggaran yang memadai sehingga semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

Kata Kunci : Pendidikan, Pelatihan, Penyusunan Laporan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Diklat adalah suatu keharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber

daya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Diklat pada instansi pemerintah, tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Negara sesuai dengan kebutuhan instansi.

Diklat Teknis yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah diklat teknis bidang keuangan sehubungan dengan penganggaran berbasis kinerja dan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, maka dalam rangka mempersiapkan aparatur yang bekerja di bidang keuangan harus memiliki kemampuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan kompetensinya.

Namun berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan diklat teknis penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan kualifikasi peserta sehingga materi yang disampaikan oleh pelatih/pemateri sulit dipahami oleh peserta. Contohnya : Tidak semua pegawai di Bagian keuangan BPKD dilibatkan dalam kegiatan diklat penyusunan laporan keuangan, sehingga ketika ada pegawai yang sudah mengikuti diklat dimutasi maka pegawai lain kesulitan karena kurang

memahami secara teknis penyusunan laporan keuangan.

2. Diklat teknis penyusunan laporan keuangan kurang rutin dilakukan sehingga pemahaman pegawai terhadap penyusunan laporan keuangan masih kurang. Contohnya : Kegiatan diklat teknis penyusunan laporan keuangan hanya dilakukan setahun sekali, padahal idealnya minimal 2 kali dalam setahun.
3. Tujuan pelaksanaan diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya tercapai. Seperti terlihat dalam hal perhitungan penyusutan asset berbentuk barang bergerak sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan bagi dinas, badan/instansi lain. Contohnya : Dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bagian Keuangan BPKD termasuk instansi lain harus menunggu hasil perhitungan akhir dari bidang asset BPKD.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran ?, 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran ?

B. LANDASAN TEORITIS

Pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel.

Adapun pengertian pendidikan dan pelatihan menurut Notoadmodjo (2009:16), adalah :

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat.

Sementara itu Ambar (2009:219), mengartikan pendidikan dan pelatihan adalah:

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas maupun profesionalisme pegawai. Hal tersebut penting karena cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi Teknis adalah kemampuan PNS dalam

bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun indikator yang dapat mengukur variabel pendidikan/pelatihan (Diklat) menurut Mangkunegara (2013:62-64) antara lain dilihat dari desain program pelatihan (Diklat) sebagai berikut :

1. Jenis pelatihan
 2. Tujuan pelatihan
 3. Materi pelatihan
 4. Metode pelatihan
 5. Kualifikasi peserta
 6. Kualifikasi pelatih/instruktur
 7. Waktu (banyak sesi) pelatihan
- Noe (2010: 5) menyatakan bahwa :

Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan upaya organisasi dalam memfasilitasi pegawai untuk belajar tentang kompetensi yang terkait dengan pekerjaannya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku sehingga dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Kemudian Hasibuan (2013: 68) menyatakan bahwa : “Kegiatan pendidikan dan latihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan sehingga melalui pendidikan dan latihan dapat meningkatkan kinerja pegawai selain itu pegawai akan lebih paham mengenai mekanisme kerja”. Disamping itu, Priansa (2012: 208) menyatakan bahwa :

Di dalam diklat metode dan materi yang diajarkan akan berpengaruh terhadap minat belajar peserta diklat tersebut. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing dan menyukai metode belajar yang berbeda-beda, dengan adanya perbedaan tersebut maka tenaga pengajar diklat harus mampu

memahami dan menjalankan tugas secara profesional agar ASN yang lulus dari diklat dapat lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dapat membantu dalam upaya peningkatan kualitas dari individu

Selanjutnya Notoatmodjo (2013: 107) mengatakan bahwa :

Instruktur adalah guru ia harus profesional dalam keguruannya. Dengan demikian Kualitas seorang instruktur/ pelatih sangat mempengaruhi kualitas sasaran peserta didik. Oleh karena itu, seorang instruktur/pelatih harus memiliki kemampuan berikut: (1) penguasaan materi yang akan diajarkan; (2) kemampuan menyusun materi ajar; (3) kemampuan memilih dan mengembangkan metode pembelajaran; (4) kemampuan menggunakan media dan sumber-sumber belajar; (5) kemampuan mengelola kelas; dan (6) kemampuan berkomunikasi dan membina hubungan dengan peserta diklat.

Nasution (2010:38) menjelaskan bahwa : “Peserta diklat terdapat karakteristik yang dapat memengaruhi prestasi belajar, yaitu (1) bakat untuk mempelajari sesuatu, (2) kesanggupan untuk memahami pelajaran, (3) ketekunan dan motivasi, (4) waktu yang tersedia untuk belajar. (5) kemampuan dan bakat, (6) kebutuhan berprestasi (*need of achievement*), dan (7) motivasi”. Kemudian masih Nasution (2010:46) yang menjelaskan bahwa : “Seorang Instruktur/Pelatih harus kompeten dalam bidangnya dan dituntut kreatif, seorang Instruktur/Pelatih dituntut menguasai misi yang diembannya, berpengetahuan dan

berpengalaman dalam bidang yang menjadi keahliannya untuk dapat ditransfer kepada peserta diklat”. Dan menurut Notoatmodjo (2013: 111) mengatakan bahwa :

Waktu pelatihan berperan dalam meningkatkan kemampuan peserta pelatihan hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya waktu pelatihan maka kemampuan peserta pelatihan akan meningkat namun apabila waktunya diperpendek maka peserta tidak akan memperoleh apapun karena materi yang dibahas pun pasti akan sedikit.

Adapun indikator dari Pendidikan/Pelatihan (Diklat) adalah menurut Rae dalam (Sofyandi, Herman, 2013:131):

1. Isi pelatihan, yaitu apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan, dan apakah pelatihan tersebut *up to date*.
2. Metode pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan sesuai untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta pelatihan.
3. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur mempunyai sikap dan keterampilan penyampaian yang mendorong orang untuk belajar.
4. Lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materitersebut.
5. Fasilitas pelatihan, yaitu apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat dikendalikan oleh

instruktur, apakah relevan dengan jenis pelatihan, dan apakah makanannya memuaskan.

Selain itu indikator yang dapat mengukur variabel Pendidikan/Pelatihan(Diklat) meliputi : (anwar,2013:76).

1. Waktu pelaksanaan Diklat, yang mencakup :
 - a. Frekuensi Peserta Mengikuti Diklat
 - b. Kesesuaian Pelaksanaan Diklat dengan waktu yang ditetapkan
2. Peserta Diklat, yang mencakup :
 - a. Intensitas kehadiran peserta
 - b. Latar Belakang Pendidikan
3. Metode Penyampaian materi Diklat, yang mencakup :
 - a. Mekanisme Penyampaian materi Diklat oleh instruktur
 - b. Peran/partisipasi aktif peserta dalam kegiatan Diklat
 - c. Komunikasi antara instruktur dan peserta Diklat
4. Instruktur, yang mencakup
 - a. Kemampuan/penguasaan instruktur terhadap materi Diklat
5. Sarana dan Prasarana Diklat, yang mencakup :
 - a. Kesesuaian antara tempat pelaksanaan dengan jumlahpeserta Diklat
 - b. Ketersediaan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan Diklat
6. Materi Diklat, yang mencakup :
 - a. Kesesuaian materi Diklat dengan tugas dan pekerjaan peserta.

- b. Penerapan/aplikasi materi diklat dalam pelaksanaan tugas

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan penjelasan terhadap berbagai fakta yang terjadi dan dapat menerangkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan
2. Waktu dan tempat Penelitian
Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2019. Tempat penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran.
3. Subjek Penelitian
Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran 1 orang dan Pegawai di Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang.
4. Prosedur
Dalam penelitian ini langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan indikator-indikator menurut teori ahli sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Yaitu :
 - a. Studi dokumentasi (pustaka)
Studi dokumentasi (pustaka) yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari photo kegiatan wawancara dengan pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran.

- b. Studi lapangan, yakni observasi dan wawancara dengan pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran.
5. Data, instrumen dan teknik pengumpulan data
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui berbagai jawaban hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber data (informan), sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta catatan-catatan lainnya yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan kajian penelitian.
6. Teknik analisis data
Analisis data yang dilakukan oleh penulis meliputi tahap-tahap seperti :observasi, wawancara, studi dokumenter dan angket, langsung dianalisis;

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan beberapa dimensi sebagai berikut:

1) Jenis pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis pelatihan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena belum adanya kesesuaian diklat teknis penyusunan laporan keuangan dengan kebutuhan pegawai dalam penyusunan laporan keuangan selain itu pelaksanaan diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum dapat meningkatkan kompetensi kerja bagi pegawai.

Noe (2010: 5) menyatakan bahwa :

Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan upaya organisasi dalam memfasilitasi pegawai untuk belajar tentang kompetensi yang terkait dengan pekerjaannya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku sehingga dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

2) Tujuan pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan pelatihan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena belum adanya peningkatan kinerja pegawai setelah mengikuti kegiatan diklat teknis penyusunan laporan keuangan selain itu pelaksanaan diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum dapat meningkatkan pemahaman pegawai terhadap mekanisme penyusunan laporan keuangan.

Menurut Hasibuan (2013: 68) menyatakan bahwa :

Kegiatan pendidikan dan latihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,

teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan sehingga melalui pendidikan dan latihan dapat meningkatkan kinerja pegawai selain itu pegawai akan lebih paham mengenai mekanisme kerja.

3) Materi pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa materi pelatihan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan materi yang disampaikan serta pegawai belum menerapkan aplikasi materi diklat dalam menunjang pekerjaannya. Menurut Priansa (2012: 208) menyatakan bahwa :

Di dalam diklat metode dan materi yang diajarkan akan berpengaruh terhadap minat belajar peserta diklat tersebut. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing dan menyukai metode belajar yang berbeda-beda, dengan adanya perbedaan tersebut maka tenaga pengajar diklat harus mampu memahami dan menjalankan tugas secara profesional agar ASN yang lulus dari diklat dapat lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dapat membantu dalam upaya peningkatan kualitas dari individu

4) Metode pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa metode pelatihan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya peran aktif peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan serta kurangnya komunikasi antara instruktur dengan peserta diklat. Menurut Notoatmodjo (2013: 107) mengatakan bahwa :

Instruktur adalah guru ia harus profesional dalam keguruannya. Dengan demikian Kualitas seorang instruktur/ pelatih sangat mempengaruhi kualitas sasaran peserta didik. Oleh karena itu, seorang instruktur/pelatih harus memiliki kemampuan berikut: (1) penguasaan materi yang akan diajarkan; (2) kemampuan menyusun materi ajar; (3) kemampuan memilih dan mengembangkan metode pembelajaran; (4) kemampuan menggunakan media dan sumber-sumber belajar; (5) kemampuan mengelola kelas; dan (6) kemampuan berkomunikasi dan membina hubungan dengan peserta diklat.

5) Kualifikasi peserta

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualifikasi pelatihan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena adanya ketidaksesuaian latarbelakang pendidikan pegawai sehingga pelaksanaan diklat kurang memberikan kontribusi dalam peningkatan kemampuan pegawai selain itu kepala kesulitan dalam merekomendasikan pegawai sebagai peserta diklat karena tidak ada pilihan

pegawai yang dianggap mampu. Menurut Nasution (2010:38) menjelaskan bahwa :

Peserta diklat terdapat karakteristik yang dapat memengaruhi prestasi belajar, yaitu (1) bakat untuk mempelajari sesuatu, (2) kesanggupan untuk memahami pelajaran, (3) ketekunan dan motivasi, (4) waktu yang tersedia untuk belajar. (5) kemampuan dan bakat, (6) kebutuhan berprestasi (*need of achievement*), dan (7) motivasi.

6) Kualifikasi pelatih/instruktur

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualifikasi pelatih dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan yang diharapkan karena pelatih/instruktur diklat teknis penyusunan laporan keuangan kurang mempunyai keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan selain itu pelatih/instruktur diklat teknis penyusunan laporan keuangan kurang mampu membangkitkan motivasi peserta diklat. Menurut Nasution (2010:46) menjelaskan bahwa :

Seorang Instruktur/Pelatih harus kompeten dalam bidangnya dan dituntut kreatif, seorang Instruktur/Pelatih dituntut menguasai misi yang diembannya, berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang yang menjadi keahliannya untuk dapat ditransfer kepada peserta diklat

7) Waktu (banyak sesi) pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa waktu pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi

pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan yang diharapkan karena diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum dilakukan secara rutin bagi pegawai di Bagian Keuangan serta diklat teknis penyusunan laporan keuangan terdiri dari sesi pembukaan dan penutupan yang kurang disesuaikan dengan banyaknya sesi dan waktu pelatihan sehingga sering terjadi pemadatan waktu pelatihan.

Menurut Notoatmodjo (2013: 111) mengatakan bahwa :

Waktu pelatihan berperan dalam meningkatkan kemampuan peserta pelatihan hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya waktu pelatihan maka kemampuan peserta pelatihan akan meningkat namun apabila waktunya diperpendek maka peserta tidak akan memperoleh apapun karena materi yang dibahas pasti akan sedikit.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

- 2) Adanya keterbatasan pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga menyebabkan kepala kesulitan dalam menentukan peserta pelatihan,
 - 3) Penyampaian materi kurang disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan mengingat materi pelatihan jarang membahas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan,
 - 4) Sering dilakukannya pemadatan waktu pelatihan menyebabkan materi pelatihan banyak yang tidak disampaikan sehingga mengurangi manfaat pelatihan yang diikuti.
- 1) Menyiapkan anggaran yang memadai sehingga semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan.
 - 2) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan sehingga keterbatasan pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi dapat diatasi.
 - 3) Meminta pemateri dalam penyampaian materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan.
 - 4) Meminta pemateri tidak melakukan pemadatan waktu pelatihan sehingga materi pelatihan dapat disampaikan secara jelas kepada peserta pelatihan.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut apabila tidak diperhatikan upaya-upayanya maka akan berdampak pada ketidaksesuaian pegawai dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tujuan suatu organisasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak akan berjalan dengan baik.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran.

Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

Berdasarkan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka kegiatan pendidikan dan pelatihan harus diupayakan dengan baik sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam meningkatkan kapasitas maupun profesionalisme pegawai dalam penyusunan laporan keuangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitia diketahui belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam mengikutsertakan

pegawai kurang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai dan dalam penyampaian materi diklat kurang memotivasi peserta pelatihan karena cenderung teoritis dalam penyampaian materi sehingga permasalahan faktual yang sering dihadapi pegawai dalam penyusunan laporan keuangan, selain itu seringkali melakukan pemadatan materi sehingga waktu pelatihan terlalu singkat sehingga menyebabkan peserta pelatihan kurang mendapatkan materi yang dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahannya karena dengan waktu yang singkat pemateri terkesan menyampaikan hal-hal secara cepat.

2. Adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitianantara lain adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan, adanya keterbatasan pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga menyebabkan kepala kesulitan dalam menentukan peserta pelatihan, penyampaian materi kurang disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan mengingat materi pelatihan jarang membahas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan, selain itu sering dilakukannya pemadatan waktu pelatihan menyebabkan materi pelatihan banyak yang tidak disampaikan sehingga

mengurangi manfaat pelatihan yang diikuti.

3. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitianantara lain adalah menyiapkan anggaran yang memadai sehingga semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan, mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan sehingga keterbatasan pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi dapat diatasi, meminta pemateri dalam penyampaian materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan, selain itu meminta pemateri tidak melakukan pemadatan waktu pelatihan sehingga materi pelatihan dapat disampaikan semuanya sehingga memberikan manfaat bagi peserta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Nasution.2010. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara
- Noe, Raymond A., et. al. 2010. Human Resource Management, Gaining Competitive Advantage 3rd Edition. *McGraw-Hill*.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Priansa, Donni Juni. 2012. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS),